



ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH KOTA KENDARI

Nita Hasnita

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Email: nitahasnita13@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Diterima : 15 Juli 2021
Diterima dalam bentuk
revisi : 14 Agustus 2021
Diajukan : 20 Agustus
2021

Kata kunci:

rasio keuangan; kinerja;
pemerintah.

Abstrak:

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja dimana harus berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kota Kendari tidak dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diajukan dan bukan berdasarkan pada pertimbangan *output* yang dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki. Penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemandirian keuangan daerah setelah penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kota Kendari ditinjau dari analisis rasio keuangan pada APBD. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2009-2013 ditinjau dari: a) Rasio Kemandirian keuangan daerah masih tergolong pada pola hubungan instruktif. b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Kendari dalam merealisasikan PAD tergolong belum efektif dan tergolong efisien. c) Rasio Keserasian menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga belanja pembangunan masih sangat rendah. d) *Debt Service Coverage Ratio* menunjukkan bahwa nilai kemampuan keuangannya layak untuk mengadakan pinjaman karena pemerintah daerah tersebut masih memiliki kemampuan yang cukup dalam mengembalikan pinjaman. e) Rasio Pertumbuhan yang telah dicapai dari periode ke periode masih bersifat fluktuatif.

Abstract:

Law No. 17 of 2003 stipulates that the APBD is prepared based on the work performance approach to be achieved. To support this policy, it is necessary to build a system that can provide data and information to prepare the APBD with a performance approach which must be oriented to the public interest. This study aims to analyze performance by analyzing financial ratios to the APBD that has been determined and implemented. In this regard, the management of the Kendari City Government's regional budget is not assessed based on whether or not the proposed budget has been exhausted and not based on consideration of the output generated from the activities carried out compared to the desired performance target. This research is a descriptive research that aims to determine the ability and financial independence of the region after the implementation of performance-based budgeting in the Kendari City Government in terms of financial ratio analysis in the APBD. The results of the study show that the financial performance of the Kendari City Government in 2009-2013 in terms of: a) The ratio of regional financial independence is still classified as an instructive relationship pattern. b) Effectiveness and Efficiency Ratio shows the performance of the Kendari City Government in realizing PAD is classified as not effective and classified as efficient. c) The Harmony Ratio shows that most of the funds owned by the Kendari City Government are still prioritized for routine expenditure needs, so development spending is still very low. d) Debt Service Coverage Ratio shows that the value of its financial capacity is feasible to make loans because the regional government still has sufficient ability to repay loans. e) The Growth Ratio that has been achieved from period to period is still fluctuating.

Keywords:

*financial ratios;
performance;
government.*

Corresponden author: Nita Hasnita

Email: nitahasnita13@gmail.com
artikel
dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021

**Pendahuluan**

Bergesernya paradigma manajemen pemerintahan, dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi sistem pengelolaan keuangan negara baik di negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membawa banyak perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan negara (Fitri, 2010).

Sejalan dengan hal di atas, dalam kerangka otonomi daerah (Indonesia, 2004), UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 membuka peluang bagi daerah untuk

mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing (Mimbar, 2014). Kedua undang-undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah (Otda) adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Selain itu, keadaan luar negeri yang juga menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui Otda (Halim & Kusufi, 2007).

Berdasar pada uraian di atas, pemerintah perlu merencanakan program kerjaya dengan mempertimbangkan benefit yang akan diperoleh masyarakat karena program tanpa perencanaan adalah buruk, dan perencanaan tanpa pengukuran adalah sia-sia. Oleh karena itu, hal penting yang dilakukan selama dalam tahap perencanaan daerah adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan hasilnya saat ini, serta langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itulah diperlukan suatu tolok ukur yang akan digunakan sebagai acuan dalam menilai hasil program yang telah direncanakan. Dengan pengukuran kinerja, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif atas perkembangan yang terjadi selama proses pelaksanaan program pembangunan.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Hasil kerja yang diperoleh haruslah sepadan atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait. Penyusunan anggaran mestinya dilakukan dengan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dana yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kota Kendari telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengandung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (Saputra et al., 2016). Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran berbasis kinerja telah mencerminkan kepentingan publik maka perlu dilakukan analisa rasio keuangan yang mendalam mengenai kinerja keuangan pemerintah Kota Kendari. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah itu sendiri dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah (Yasrie, 2017). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*) (Pranicha, 2011).

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kendari dari Tahun 2009-2013, realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran yang telah direncanakan, maka diperlukan analisis yang mendalam mengenai kinerja keuangan pemerintah Kota Kendari. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Machmud, M., dkk (2017, h.4)), hasil analisis rasio keuangan tersebut selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, serta melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Hal ini sangat menarik untuk dikaji sehingga penulis meneliti tentang “Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan beberapa rasio yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, *Debt Service Coverage Ratio*, dan Rasio Pertumbuhan. Objek dari penelitian ini adalah Anggaran dan Realisasi APBD, struktur penerimaan APBD Kota Kendari, rekapitulasi belanja Kota Kendari, realisasi dan target PAD, serta sumber PAD Kota Kendari Periode 2009 s/d 2013.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kota Kendari. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kota Kendari Tahun 2009 s/d 2013.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan bantuan pemerintah pusat, propvinsi atau pinjaman. Adapun hasil perhitungan terhadap rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari selama Periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari

Tahun	PAD (RP)	Bantuan (RP)	%	Pola Hubungan
2009	33.848.814.815,76	449.877.052.679,00	7,52	Instruktif
2010	46.736.680.947,39	536.579.487.314,00	8,71	Instruktif
2011	62.800.131.070,43	632.633.329.156,00	9,93	Instruktif
2012	70.857.916.205,44	667.130.181.690,00	10,62	Instruktif
2013	94.863.574.284,80	817.751.030.440,00	11,60	Instruktif

Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah

Perhitungan tabel 1 diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun (2009 s/d 2013), rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari mengalami peningkatan. Meskipun secara kuantitas PAD Pemerintah Kota Kendari tiap tahunnya meningkat, akan tetapi secara kualitas menurun. Hal ini disebabkan oleh bantuan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Dana Alokasi Umum) yang tiap tahunnya semakin besar yang tidak diimbangi peningkatan PAD secara lebih proporsional.

Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pendapatan Pemerintah Kota Kendari diketahui melalui rasio antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan yang ditetapkan dan biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Adapun hasil perhitungan terhadap rasio efektivitas dan rasio efisiensi selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Kendari

Tahun	PAD Dianggarkan (RP)	Realisasi PAD (RP)	Biaya	%	%
			Pemungutan PAD (RP)		
2009	35.553.894.046,00	33.848.814.815,76	0,00	95,20	0,00
2010	48.192.394.046,00	46.736.680.947,39	168.071.370,00	96,98	0,36
2011	92.471.524.131,00	62.800.131.070,43	88.677.887,00	67,91	0,14
2012	83.213.457.737,00	70.857.916.205,44	1.060.752.000,00	85,15	1,50
2013	94.796.395.222,00	94.863.574.284,80	2.087.445.903,00	100,07	2,20

Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari diolah

Berdasarkan perhitungan tabel 2 dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Kendari tergolong belum efektif dan tergolong efisien. Dimana untuk persentase rasio efektivitas dari tahun 2009 sampai dengan 2012 belum mencapai 1 (satu) atau 100%, namun untuk tahun 2013 rasio efektivitas telah menunjukkan pencapaian yang efektif dengan batas minimal 1,07 atau 100,07%. Dan persentase rasio efisiensi menunjukkan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) atau 100% dari tahun 2010-2013 dengan kata lain kinerja pemerintah.

Rasio keserasian diukur dengan membandingkan total belanja rutin dan total belanja pembangunan terhadap total APBD. Adapun hasil perhitungan rasio keserasian Pemerintah Kota Kendari selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio keserasian Pemerintah Kota Kendari

Tahun	TBR (RP)	TBP (RP)	Total APBD	%	%
2009	401.136.237.171,00	105.054.351.873,00	507.202.808.544,00	79,09	20,71
2010	453.088.260.702,00	145.770.633.948,00	602.076.994.650,00	75,25	24,21
2011	537.670.875.419,00	145.111.628.036,00	684.117.220.811,00	78,58	21,21
2012	603.526.713.377,00	111.198.677.817,00	715.044.891.194,00	84,40	15,55
2013	652.372.171.376,46	196.885.074.583,34	849.332.245.959,80	76,81	23,18

Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah

Hasil perhitungan tabel. 3 rasio keserasian di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Kendari masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga belanja pembangunan terhadap APBD masih sangat rendah (relatif kecil).

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) diukur dengan membandingkan anantara penjumlahan PAD, bagian daerah, dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman. Adapun hasil perhitungan DSCR Pemerintah Kota Kendari selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. DSCR Pemerintah Kota Kendari

Keterangan	Tahun Anggaran (Rp)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	33.848.814.815,76	46.736.680.947,39	62.800.131.070,43	70.857.916.205,44	94.863.574.284,80
Bagian Daerah:	30.602.469.572,00	38.159.475.319,00	33.428.943.867,00	344.840.591.359,00	41.148.724.648,00
Dana Bagi Hasil Pajak	29.748.856.858,00	36.846.993.540,00	29.998.896.679,00	336.556.234.707,00	30.426.620.625,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	853.612.714,00	1.312.481.779,00	3.430.047.188,00	8.284.356.652,00	10.722.104.023,00
Dana Alokasi Umum	339.094.211.000,00	345.765.495.000,00	399.485.271.000,00	478.763.604.000,00	555.693.881.000,00
Belanja Wajib:					
Belanja Pegawai	292.416.050.389,00	357.430.166.647,00	414.446.552.901,00	471.427.571.415,00	512.828.182.021,15
Belanja Bunga	128.714.349,00	109.643.624,00	90.572.894,00	71.711.160,00	52.431.439,00
Pembayaran Pokok Hutang	160.080.720,00	160.080.720,00	160.080.720,00	160.080.721,00	160.080.719,00
DSCR	384,80	271,50	324,22	1.825,06	841,73

Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 di atas, DSCR untuk tahun anggaran 2009-2013 masing-masing sebesar, 384,80 ditahun 2009; 271,50 ditahun 2010; 324,22 ditahun 2011; 1.825,06 ditahun 2012 dan 841,73 ditahun 2013. Ini menunjukkan DSCR =2,5 artinya bahwa kemampuan membayar kembali pinjaman sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah layak melakukan pinjaman apabila terjadi kekurangan dana atau defisit anggaran.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Kendari selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Kendari

Keterangan	Tahun Anggaran (Rp)				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pendapatan Asli Daerah	33.848.814.815,76	46.736.680.947,39	62.800.131.070,43	70.857.916.205,44	94.863.574.284,80
Pertumbuhan PAD	-	38,07	34,37	12,83	33,88

Total	484.056.981.4	583.316.168.2	698.804.774.1	745.296.446.4	916.010.599.6
Pendapatan	41,76	61,39	62,43	55,44	07,80
Pertumbuhan Pendapatan	-	20,51	19,80	6,65	22,91
Belanja Rutin (BR)	401.136.237.1 71,00	453.088.260.7 02,00	537.670.875.4 19,00	603.526.713.3 77,00	652.372.171.3 76,46
Pertumbuhan BR	-	12,95	18,67	12,25	8,09
Belanja Pembanguna n (BP)	105.054.351.8 73,00	145.770.633.9 48,00	145.111.628.0 36,00	111.198.677.8 17,00	196.885.074.5 83,34
Pertumbuhan BP	-	38,76	-0,45	-23,37	77,06

Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 rasio pertumbuhan diatas, kondisi pertumbuhan APBD Pemerintah Kota Kendari setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan bersifat fluktuatif. Ini dapat dilihat rasio pertumbuhan mengalami penurunan dua tahun berturut yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012.

Pembahasan

1) Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin menunjukkan *trend* yang positif. Hal ini dapat dilihat pada persentase rasio kemandirian yang meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan pada tahun anggaran 2009 hingga tahun 2013 disebabkan karena adanya peningkatan pada pos-pos pendapatan asli daerah yakni pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Walaupun tingkat persentase kemandirian Pemerintah Kota Kendari menunjukkan *trend* yang positif akan tetapi rata-rata rasio kemandirian dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2009-2013 yang mencapai 9,68% menginterpretasikan pola kemandirian yang masih instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pola instruktif tersebut yang membuat ketergantungan pemerintah daerah Kota Kendari dari sisi finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer Pemerintah Kota Kendari yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, pendapatan bagi hasil pajak/non pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer pemerintah pusat lainnya, dana penyesuaian, transfer pemerintah provinsi, pendapatan bagi hasil pajak, dan pendapatan bagi hasil lainnya yang mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2009-2013.

Mokodompit, P.S., dkk (2014, h. 1527) mengatakan bahwa agar pemerintah dapat menjalankan proses desentralisasi, tidak terlalu bergantung soal keuangan kepada pemerintah

pusat dan provinsi, serta tingkat kemandirian keuangan pemerintah dapat meningkat maka yang harus dilakukan adalah mengupayakan peningkatan pada sektor PAD, melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.

2) **Rasio Efektivitas dan Efisiensi**

Hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam merealisasikan PAD yang direncanakan belum efektif karena rata-rata persentase rasio efektivitas yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 100% yakni 89,06%. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 dan 2012 anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih rendah dari capaian/realisasi PAD yakni sebesar Rp. 60.800.131.070,43 atau 67,91% dan Rp. 70.857.916.205,44 atau 85,15% sedangkan target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 92.471.524.131,00 dan Rp. 82.213.457.737,00. Rendahnya realisasi PAD pada tahun 2011 disebabkan adanya pos PAD yang berada jauh dibawah target/anggaran yang ditetapkan yakni lain-lain PAD yang sah dimana anggaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 37.442.100.000,00 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 6.203.916.703,43. Perbedaan selisih yang jauh tersebut juga disebabkan karena adanya sumber-sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah yang tidak tercapai.

Walaupun kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan tugasnya masih kurang stabil karena mengalami rasio efektivitas yang naik turun, tetapi rasio efisiensi Pemerintah Kota Kendari pada Tahun 2010 hingga Tahun 2013 sudah efisien, disebabkan secara keseluruhan Pemerintah Kota Kendari memiliki rata-rata persentase yang kurang dari 1 (satu) atau 100% yakni 1,85%. Dengan demikian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kendari efisien dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) secara maksimal.

3) **Rasio Keserasian**

Hasil perhitungan rasio keserasian menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pembangunan (belanja modal) masih sangat rendah. Dapat dilihat pada persentase belanja pembangunan (belanja modal) yang masih jauh berada dibawah persentase belanja rutin (belanja operasi). Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada pos belanja rutin (belanja operasi) yakni pada pos belanja pegawai yang meningkat tiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan peningkatan pos-pos pada belanja pembangunan (belanja modal). Pramono (2014, h. 111) mengatakan agar lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

4) **Debt Service Coverage Ratio**

Hasil perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) mengindikasikan kelayakan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, DSCR paling sedikit 2,5 (pasal 16, PP No. 11 Tahun 2011 tentang Pinjaman daerah). Berdasarkan pada tabel diatas, kemampuan pemerintah daerah Kota Kendari dalam membayar kembali pinjaman sangat baik. Dari tahun 2009 hingga tahun 2013 persentase DSCR Pemerintah Kota Kendari diatas standar persyaratan (DSCR =2,5) artinya bahwa pemerintah daerah memiliki peluang untuk melakukan pinjaman apabila diperlukan. Hanik dan Karyanti (2014, h. 155) dalam penelitiannya mengatakan hal yang sama

bahwa apabila DSCR sudah melebihi dari standar ketentuan kemampuan daerah untuk melakukan pinjaman. Maka, layak untuk melakukan pinjaman, baik jangka menengah maupun jangka panjang apabila terjadi kekurangan dana atau defisit anggaran.

5) Rasio Pertumbuhan

Kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada tingkat persentase PAD, pendapatan, belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja modal) yang masih bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan realisasi PAD, pendapatan, belanja rutin dan belanja pembangunan berada dibawah target anggaran yang ditetapkan. Sijabat, dkk (2014, h. 241) mengatakan nilai rasio yang rendah menunjukkan pertumbuhannya mengalami tren yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja pembangunan daerah yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik tidak dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tingkat kemampuan dan kemandirian Pemerintah Kota Kendari setelah anggaran berbasis kinerja diterapkan ditinjau dari analisis rasio keuangan belum begitu baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 9,68% (<25%), rasio efektivitas persentase rata-ratanya sebesar 89,06% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung belum stabil atau belum efektif, rasio efisiensi Pemerintah Kota Kendari persentase rata-ratanya 2,25% artinya adalah kinerja pemerintah daerah dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal tergolong efisien, rasio keserasian Pemerintah Kota Kendari menunjukkan pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan, dan *debt service coverage ratio* Pemerintah Kota Kendari persentase rata-ratanya 729,47% (DSCR =2,5%) yang menunjukkan bahwa secara potensial pemerintah daerah apabila kekurangan dana mempunyai kesempatan untuk melakukan pinjaman, serta rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Kendari dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya masih rendah.

BIBLIOGRAFI

- Fitri, I. (2010). [Implikasi Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang](#). *Tugas Akhir Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi UM*.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). [Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah](#). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanik, F.U., & Karyanti, T.D. (2014). Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *JABPI*. Vol. 22(2), 143-156.
- Indonesia, R. (2004). [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah](#). Jakarta (ID): RI.
- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol, 14(2), 1-13.
- Mimbar, L. (2014). [Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tentang Dana Alokasi Umum \(Dau\) Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2013](#). *Jurnal Valid Vol, 11(2)*, 73-80.
- Mokodompit, P.S., Pangemanan, S.S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. 2(2), 1521-1527.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*. 7(13), 83-112.
- Pranicha, H. (2011). [Analisis Rasio Keuangan APBD tahun 2006-2009 Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar](#).
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2016). [Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014](#). *Jurnal Manajemen Indonesia*, 4(1).
- Sijabat, M.S., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2(2), 236-242.
- Yasrie, A. (2017). [Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016](#). *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2).